BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung berdiri tanggal 20 April 1641, bertepatan dengan keluarnya "Serat Piyagem" Sultan Ageng Mataram yang menyebutkan ping songo tahun alif bulan muharam. Pada saat itu pula Tumenggung Wiraangun angun sebagai Bupati Bandung pertama.

Dalam perhitungan Masehi, *"Ping Sangan Bulan Muharam Tahun Alip"* tersebut bertepatan dengan tanggal 20 April 1641. Perhitungan itu diungkapkan salah seorang Arsiparis Belanda yang bernama F. De Haan. Perhitungan F. De Haan seperti tertulis dalam buku sejarah Kabupaten Bandung yang disusun BPID dan UNPAD tahun 2003, demikian sederhana. Menurutnya, tahun Alip dalam Amanac Jawa dimulai tahun 1633 Masehi. Tahun – tahun Alip yang dialami selama Pemerintahan Sultan Agung (1613 – 1645) ialah 1633 dan 1641. Biasanya kata F. De Haan segala tindakan Raja Mataram terhadap daerah Priangan, selalu diberitahukan kepada Wedana Bupati, dalam hal ini Pangeran Rangga Gede. Dalam *serat piagem* itu, tidak disebut – sebut Rangga Gede atau pembesar Mataram di Priangan. Jadi menurut F. De Haan tidak mungkin *serat piagem* ditulis pada tahun 1633 Masehi.

Pada waktu bersamaan, Sultan Agung Mataram menunjuk pula Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya menjadi Bupati Parakanmuncang. Kala itu, jabatan bupati disebut pula sebagai Mantri Agung. Adapun pusat pemerintahan Kabupaten Bandung saat itu berada

didaerah *"Krapyak"*, sebuah daerah yang tidak jauh dari aliran sungai Citarum diseputar kawasan DayeuhKolot sekarang. Dalam istilah Belanda, DayeuhKolot disebut dengan nama *"Oude Negorij"*, atau Negara Lama. Pada masa sekarang daerah itu dinamakan Kampung Citeureup yang berada di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot.

Saat Kabupaten Bandung dibentuk, jumlah penduduk hanya berkisar 300 cacah atau jiwa yang tersebar di 14 daerah. Pada masa kekuasaan Mataram, daerah yang masuk ke wilayah Kabupaten Bandung meliputi :

1. Tatar Ukur yang terdiri Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo dan Ujungberung.
2. Kuripan.
3. Sagaraherang.
4. Sebagian Tanahmedang.

Setelah ditetapkan sebagai penguasa Bupati atau Mantri Agung, ada beberapa hak istimewa yang dimiliki para Bupati di Priangan termasuk Kabupaten Bandung selama masa kekuasaan Sultan Agung Mataram, diantaranya :

1. Hak Pemilik Tanah
2. Hak Penguasaan dan Pengabdian dari Penduduk
3. Hak Memungut Pajak
4. Hak atas Priangan dan Berburu
5. Hak untuk Menentukan Hukum Sendiri

Hak – hak istimewa tersebut pada tahun 1677 diambil oleh *VOC* seiring dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasaan ini, diangggap sebagai balas jasa kepada *VOC* karena telah ikut membantu dalam penumpasan pemberontakan Trunojoyo. Adapun wilayah Priangan yang diserahkan kepada *VOC* meliputi : Kabupaten Bandung, Parakanmuncang, dan Sumedang. Penyerahan wilayah kekuasaan dilakukan Sultan Agung Mataram Susuhunan Amangkurat II kepada Admiral Speelman dari pihak *VOC.*

Dengan diserahkannya Priangan tengah ke *VOC*, maka secara otomatis Kabupaten Bandung berada dibawah genggaman *VOC* atau kompeni Belanda. Namun demikian pengambil alihan kekuasaan tidak berlangsung cepat. Karena pada tanggal 15 November 1684, Komandan Jacob Couper dan Kapten Joachung Michiel atas perintah Gubernur Jenderal Johanes Camphuijs melakukan reorganisasi wilayah Priangan menjadi 7 (Tujuh) Kabupaten, meliputi :

1. Kabupaten Bandung.
2. Kabupaten Sumedang.
3. Kabupaten Timbanganten.
4. Kabupaten Sukapura.
5. Kabupaten Parakanmuncang.
6. Kabupaten Imbanagara.
7. Kabupaten Kawasen.

Selain melakukan reorganisasi wilayah, *VOC* melakukan pula sistem *"Preanger Stelsel"* atas daerah Priangan sistem ini sengaja diberlakukan *VOC*, karena tujuan pokok *VOC* di daerah Priangan bukan melakukan Pemerintahan langsung, namun lebih banyak berinisiatif memungut hasil perdagangan untuk kepentingan mereka. Namun demikian untuk memperkuat legitimasi kekuasaan *VOC* ditanah Priangan, maka dikeluarkan *"Acta Van Aanstlellingen"* semacam surat pengangkatan sebagai Bupati yang dikeluarkan *VOC.*

Dengan keluarnya akta tersebut, maka para Bupati Tanah Priangan mempunyai kewajiban menyerahkan upeti kepada *VOC*. Upeti tersebut berupa komoditas perdagangan seperti kayu, lada, nila (indigo), kapas, kopi, serta gula yang besarnya ditentukan sendiri oleh *VOC.*

Kabupaten Bandung sempat mengalami beberapa masa pemerintahan yang berbeda. Bahkan dalam bukunya perkembangan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Dari masa ke masa) yang disusun oleh R.H Lily Sumantry, H. Sulaeman Anggapraja dan H Ahmad Syafei, membagi masa Pemerintahan Kabupaten Bandung kedalam beberapa periode, masing – masing :

1. Kabupaten Bandung masa Padjajaran.
2. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Islam.
3. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Sumedang Larang.
4. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan VOC.
5. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Aria Cirebon.
6. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Daendles.
7. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Raffles.

8. Kabupaten Bandung masa Pemerintahan Belanda dari tahun 1816 s/d 1942.

Periode 1794 - 1829 saat Kabupaten Bandung dibawah perintah Bupati R A Wiranatakusumah II (Dalem Kaum), terjadi perpindahan pusat pemerintahan dari Krapyak ke suatu daerah di tepian Sungai Cikapundung (Alun-alun Kota Bandung sekarang). Perpindahan tersebut atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels yang berkuasa di Pulau Jawa tahun 1808-1811.

Perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung, berkaitan dengan dibangunnya Jalan Raya Pos (de Grote Postweg) mulai dari Anyer (Banten) hingga Panarukan (Jawa Timur) sepanjang ± 1.000 km yang digagas Daendels. Jalan raya pos selanjutnya digunakan untuk kepentingan mobilisasi tentara Hindia Belanda di Pulau Jawa.

Keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1986 tentang pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Soreang, menjadi titik awal pemindahan pusat pemerintahan Kabupaten Bandung dari lokasi alun-alun Kota Bandung sekarang ke Soreang. Maka tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 1 April 1989 pusat Ibukota Kabupaten Bandung resmi berpindah ke Soreang. Saat itu Kabupaten Bandung dibawah pemerintahan Kol. (inf) H. D Cherman Effendi. Berikut perjalanan masa jabatan Para Bupati Kabupaten Bandung :

Kabupaten Bandung lahir melalui Piagam Sultan Agung Mataram, yaitu pada ping Songo tahun Alif bulan Muharam atau sama dengan hari sabtu tanggal 20 April tahun 1641 M, Sultan Agung menetapkan menetapkan Tumenggung Wiraangunangun (1641-1681 M) sebagai Bupati atau mantra Agung pertama.

Sementara Tumenggung Wiradadaha menjadi Bupati Sukapura dan Tumenggung Tanubaya sebagai Bupati Parakanmuncang. Dari bukti sejarah tersebut maka ditetapkan bahwa tanggal 20 April sebagai tanggal Hari Jadi Kabupaten Bandung. Jabatan Bupati kemudian di gantikan oleh Tumenggung Nyili salah seorang putranya. Namun Nyili tidak lama memegang jabatan tersebut karena mengikuti Sultan Banten. Jabatan Bupati kemudian di lanjutkan oleh Tumenggung Ardikusumah, seorang Dalem Tenjolaya (Timbanganten) dari tahun 1681 -1704.

Kedudukan Bupati Kabupaten Bandung dari R. Ardikusumah diserahkan kepada putranya R. Ardisuta yang diangkat tahun 1704 setelah Pemerintah Belanda mengadakan pertemuan dengan para Bupati Wilayah Priangan di Cirebon. R. Ardisuta (1704 - 1747) terkenal dengan nama Tumenggung Anggadiredja I setelah wafat dia sering disebut Dalem Gordah. sebagai penggantinya diangkat Putra tertuanya Demang Hatapradja yang bergelar Anggadiredja II (1707 - 1747).

Pada masa Pemerintahan Anggadiredja III (1763 - 1794) Kabupaten Bandung disatukan dengan Timbanganten, bahkan pada tahun 1786 dia memasukkan Batulayang kedalam Pemerintahannya. Juga pada masa Pemerintahan Adipati Wiranatakusumah II (1794 - 1829) inilah Ibukota Kabupaten Bandung di pindahkan dari Karapyak (Dayeuh kolot) ke Pinggir sungai Cikapundung atau Alun - alun Kotamadya Bandung sekarang. Pemindahan Ibukota itu atas dasar perintah dari Gubernur Jendral Hindia Belanda Daendels tanggal 25 Mei 1810, dengan alasan karena daerah baru tersebut dinilai akan memberikan prospek yang lebih baik terhadap perkembangan wilayah tersebut.

Setelah kepala pemerintahan di pegang oleh Bupati Wiranatakusumah IV (1846 - 1874) Ibukota Kabupaten Bandung Berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai Bupati yang progresif. dialah peletak dasar master plan Kabupaten Bandung, yang disebut Negorij Bandoeng. Tahun 1850 dia mendirikan pendopo Kabupaten Bandung dan Mesjid Agung. kemudian dia memprakarsai pembangunan sekolah Raja (pendidikan Guru) dan mendirikan sekolah untuk para menak (Opleiding School Voor Indische Ambtenaaren). atas jasa-jasanya dalam membangun Kabupaten Bandung disegala bidang beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Kolonial Belanda berupa Bintang jasa, sehingga masyarakat menjulukinya dengan sebutan dalem bintang.

Dimasa pemerintahan R. Adipati Kusumahdilaga jalan Kereta Api mulai masuk tepatnya tanggal 17 Mei 1884. Dengan masuknya jalan Kereta Api ini Ibukota Bandung kian ramai. Penghuninya bukan hanya pribumi, bangsa Eropa dan Cina pun mulai menetap di Ibukota, dampaknya perekonomian Kota Bandung semakin maju. Setelah wafat penggantinya diangkat RAA. Martanegara, Bupati ini pun terkenal sebagai perencana kota yang jempolan. Martanegara juga dianggap mampu menggerakkan rakyatnya untuk berpartisipasi aktif dalam menata wilayah kumuh menjadi pemukiman yang nyaman. Pada masa pemerintahan R.A.A. Martanegara (1893 - 1918) ini atau tepatnya pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung sebagai Ibukota Kabupaten Bandung berubah statusnya menjadi Gementee (Kotamadya).

Periode selanjutnya Bupati Kabupaten Bandung dijabat oleh Aria Wiranatakusumah V (Dalem Haji) yang menjabat selama 2 periode, pertama tahun 1912 - 1931 sebagai Bupati yang ke 12 dan berikutnya tahun 1935 - 1945 sebagai Bupati yang ke 14. Pada periode tahun 1931 - 1935 R.T. Sumadipradja menjabat sebagai Bupati ke 13. Selanjutnya pejabat Bupati ke 15 adalah R.T.E. Suriaputra (1945 - 1947) dan penggantinya adalah R.T.M Wiranatakusumah VI alias aom Male (1948 - 1956), kemudian diganti oleh R. Apandi Wiriadipura sebagai Bupati ke 17 yang dijabatnya hanya 1 tahun (1956 - 1957).

Sebagai Bupati berikutnya adalah Letkol R. Memet Ardiwilaga (1960 - 1967). Kemudian pada masa transisi kehidupan politik Orde Lama ke Orde Baru adalah Kolonel Masturi. Pada masa Pimpinan Kolonel R.H. Lily Sumantri tercatat peristiwa penting yaitu rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yang semula berada di Kotamadya Bandung ke Wilayah Hukum Kabupaten Bandung yaitu daerah Baleendah. Peletakan Batu Pertamanya pada tanggal 20 April 1974 yaitu pada saat Hari Jadi Kabupaten Bandung yang ke - 333. Rencana kepindahan Ibukota tersebut berlanjut hingga jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman (1980 - 1985). Atas pertimbangan secara fisik geografis daerah Baleendah tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai Ibukota Kabupaten, maka ketika Jabatan Bupati dipegang oleh Kolonel H.D. Cherman Affendi (1985 - 1990), Ibukota Kabupaten Bandung pindah ke lokasi baru yaitu Kecamatan Soreang. Dipinggir Jalan Raya Soreang tepatnya di Desa Pamekaran inilah di Bangun Pusat Pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 Ha, dengan menampilkan arsitektur

khas gaya Priangan sehingga kompleks perkantoran ini disebut - sebut sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. Pembangunan perkantoran yang belum rampung seluruhnya dan dilanjutkan oleh bupati berikutnya yaitu Kolonel H.U. Djatipermana, sehingga pembangunan tersebut dirampungkan dalam kurun waktu 1990-1992.

Tanggal 5 Desember 2000, Kolonel H. Obar Sobarna S.IP terpilih oleh DPRD Kabupaten Bandung menjadi Bupati Bandung dengan didampingi oleh Drs. H. Eliyadi Agraraharja sebagai Wakil Bupati. Sejak itu, Soreang betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan.Tahun 2003 semua aparat Daerah, kecuali Dinas Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kebersihan, Kantor BLKD, dan Kantor Diklat, sudah resmi berkantor di komplek perkantoran Kabupaten Bandung. Pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna S.IP telah dibangun Stadion Olahraga si Jalak Harupat, yaitu stadion bertaraf internasional yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu pada masa pemerintahan H. Obar Sobarna, S.IP berdasarkan aspirasi masyarakat yang diperkuat oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Kota Administratif Cimahi berubah status menjadi Kota Otonom. Tanggal 5 Desember 2005. H. Obar Sobarna, S.IP menjabat Bupati Bandung untuk kedua kalinya didampingi oleh H. Yadi Srimulyadi sebagai Wakil Bupati, melalui proses pemilihan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Dimasa pemerintahan H.Obar Sobarna, S.IP yang kedua ini, berdasarkan dinamika masyarakat dan didukung oleh hasil penelitian dan pengkajian dari 5 perguruan tinggi, secara yuridis sudah terbentuk Kabupaten Bandung Barat bersamaan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor

12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan Visi & quot ; Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan, dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa," Kabupaten Bandung bertekad untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan. Hingga usia 365 tahun, Kabupaten Bandung telah diperintah oleh 27 Bupati, dengan susunan sebagai berikut :

1.	Tumenggung Wira Angun-angun	Tahun 1641-1670
2.	Tumenggung Nyili	Tahun 1670-1681
3.	Tumenggung Ardikusumah	Tahun 1681-1704
4.	Tumenggung Ardisuta (Tumenggung Anggadiredja I)	Tahun 1704-1747
5.	Demang Natapradja (Tumenggung Anggadiredja II)	Tahun 1747-1763
6.	Tumenggung Anggadiredja III (Wiranatakusumah I)	Tahun 1763-1794
7.	R.A. Wiranatakusumah II (Dalem Kaum)	Tahun 1794-1829
8.	R.A. Wiranatakusumah III (Dalem Karang Anyar)	Tahun 1829-1846
9.	R A. Wiranatakusumah IV (Dalem Bintang)	Tahun 1846-1874

10.	R.A. Kusumadilaga (Dalem Marhum)	Tahun 1874-1893
11.	R.A.A. Martanegara	Tahun 1893-1918
12.	R.H.A.A. Wiranatakusumah V (Dalem Haji)	Tahun 1920-1931
13.	R.T. Hasan Sumadipradja	Tahun 1931-1935
14.	R.H.A.A. Wiranatakusumah V	Tahun 1935-1945
15.	R.T.E. Suriaputra	Tahun 1945-1947
16.	R T M Wiranatakusumah VI (Aom Male)	Tahun 1948-1956
17.	R. Apandi Wiradiputra	Tahun 1956-1957
18.	Letkol Inf. H. Memed Ardiwilaga	Tahun 1960-1967
19.	Kol. Inf. (Anumerta) Masturi	Tahun 1967-1969
20.	Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri	Tahun 1969-1975 (I)
21.	Letkol CAJ. R.H. Lily Sumantri	Tahun 1975-1980 (II)
22.	Kol. Inf. Sani Lupias Abdurrahman	Tahun 1980-1985
23.	Kol. CHI. J. D Cherman Effendi	Tahun 1985-1990
24.	Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP	Tahun 1990-1995 (I)
25.	Kol. CI. H. U. Hatta Djatipermana, S.IP	Tahun 1995-2000 (II)
26.	Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP	Tahun 2000-2005 (I)
27.	Kol. Inf. (Purn) H. Obar Sobarna, S. IP	Tahun 2005-Sekarang

Gambar 1.1

Foto Bupati Bandung



Sumber : Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung, 2010

1.1.1 Visi Pemerintahan Kabupaten Bandung

Adapun visi dari Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu :

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Repeh Rapih Kertaraharja, melalui Akselerasi Pembangunan Partisipatif yang Berbasis Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan dengan Berorientasi pada Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa."

Makna dari Visi tersebut diatas adalah:

Repeh Rapih Kertaraharja adalah tujuan yang ingin dicapai, yaitu suatu kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang hidup dalam keadaan aman, tertib, tenram, damai, sejahtera, senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan dan rahmat dari Allah SWT.

Akselerasi Pembangunan atau percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan leh masyarakat. Percepatan pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bandung.

Partisipatif merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya pencapaian tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, muali dari tahap perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai dengan paradigma kepemrintahan yang baik, bahwa kedudukan masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang turut membantu mengarahkan pembangunan sesuai dengan prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara proporsional dan bertanggungjawab.

Religius mengandung pengertian bahwa nilai-nilai, norma, semangat dan kaidah agama khususnya Islam yang diyakini dan dianut serta menjadi karakter dan identitas mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung harus menjiwai, mewarnai, menjadi roh dan pedoman seluruh aktivitas kehidupan, termasuk

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan tetap menjunjung tinggi toleransi dan kerukunan hidup beragama.

Kultural mengandung pengertian bahwa nilai-nilai budaya sunda yang baik, melekat dan menjadi jati diri masyarakat Kabupaten Bandung harus tumbuh dan berkembang seiring dengan laju pembangunan, serta menjadi perekat keselarasan dan stabilitas sosial. Pengembangan budaya Sunda tersebut dilakukan dengan tetap menghargai pluralitas kehidupan masyarakat secara proporsional.

Berwawasan Lingkungan mengandung pengertian perhatian dan kepedulian yang tinggi terhadap keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang didasari oleh kesadaran akan fungsi strategis lingkungan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Daya dukung dan kualitas lingkungan harus menjadi acuan utama segala aktivitas pembangunan agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang, nyaman dan berkelanjutan.

Peningkatan Kinerja Pembangunan Desa mengandung pengertian, bahwa pembangungan di Kabupaten Bandung memberikan perhatian yang besar dan sungguh-sungguh terhadap pembangunan desa, peningkatan kualitas kinerja pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan. Desa yang dalam susunan pemerintahan merupakan unit pemerintahan terendah adalah ujung tombak pembangunan Daerah dan locus yang menjadi muara seluruh aktivitas pembangunan.

1.1.2 Misi Pemerintahan Kabupaten Bandung

Untuk mewujudkan Visi diatas, maka harus ditetapkan juga Misi yang harus mendapatkan perhatian seksama dimana tugas yang diemban oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

1. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik.
2. Memelihara Stabilitas dan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenteram dan Dinamis.
3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat.
5. Memantapkan Kesalehan Sosial Berlandaskan Iman dan Taqwa.
6. Menggali dan Menumbuhkembangkan Budaya Sunda.
7. Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan.
8. Meningkatkan Kinerja Pembangunan Desa.

1.1.3 Logo Pemerintah Kabupaten Bandung

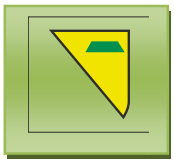
Gambar 1.2

Logo Pemerintah Kabupaten Bandung



Sumber : Subag Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung, 2010

Lambang Kabupaten Bandung berbentuk perisai terbagi atas lima bagian, yaitu :



1. **Bagian kanan atas berlatar kuning emas**

   Latar belakang kuning emas dengan gambar gunung (Gunung Tangkuban Parahu), berwarna hijau. Melambangkan bahwa Kabupaten Bandung termashur karena tanahnya yang subur di daerah bergunung - gunung dan sebagai ciri memiliki Gunung Tangkuban Parahu yang sangat terkenal dengan legenda Sangkuriang.



2. Bagian melintang bergerigi

Bagian yang melintang dengan bergerigi merupakan bentuk bendungan kokoh kuat berwarna hitam. Melambangkan masyarakat Kabupaten Bandung memiliki pendirian yang kokoh kuat, baik secara fisik secara dalam membendung air maupun membendung hawa nafsu.



3. Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah

Pohon kina berwarna hijau dan berlatar belakang merah, melambangkan bahwa di tatar Kabupaten Bandung memiliki lahan perkebunan yang cukup luas dan perkebunan kina di Kabupaten Bandung yang terluas di Asia dengan kualitas baik.



4. Garis - garis bergelombang berwarna putih dan biru

Garis - garis bergelombang berwarna putih dan biru. Melambangkan di Kabupaten Bandung kaya akan air, baik air maupun danau. Kabupaten Bandung dilintasi oleh Sungai Citarum, Cikapundung dan sungai kecil lainnya serta memiliki danau (situ) Patenggang dan Cileunca.



5. Dibawah perisai tertulis dalam pita kuning : REPEH RAPIH KERTARAHARJA

Repeh, artinya suasana kehidupan yang aman dan tenteram.

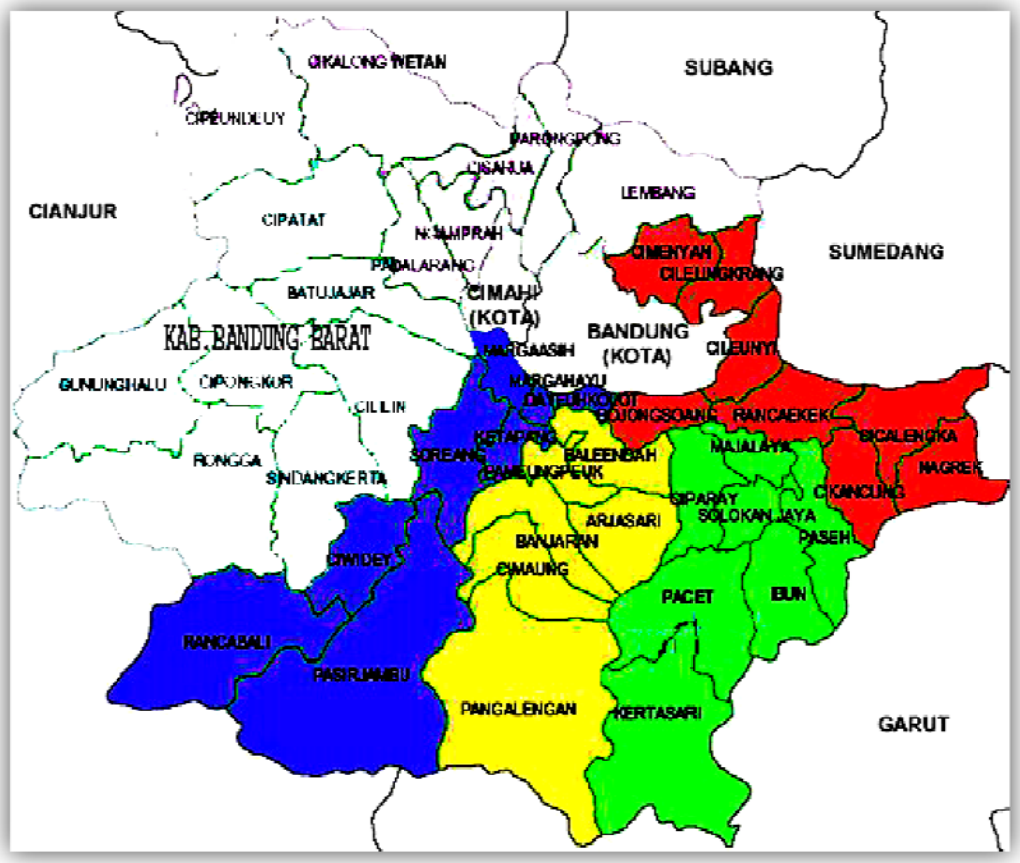
Rapih, artinya suasana kehidupan yang rukun dan tertib dalam lingkungan yang bersih, sehat dan asri.

Kertaraharja, artinya tatanan kehidupan yang sejahtera lahir dan bathin secara seimbang, serasi, adil dan merata.

Selain itu Kabupaten bandung mempunyai beberapa wilayah seperti, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.3

Peta Wilayah Kabupaten Bandung



Sumber : Subag Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung, 2010

Kabupaten Bandung, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah **Soreang**. Secara geografis letak Kabupaten Bandung berada pada 6°,41’ – 7°,19’ Lintang Selatan dan diantara 107°22’ – 108°5’ Bujur Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. Batas Utara Kabupaten Bandung Barat; Sebelah Timur Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Garut; Sebelah Selatan Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur sebelah Barat Kabupaten Bandung Barat; di bagian Tengah Kota Bandung dan Kota Cimahi. Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 Desa dan 9 Kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebesar 2.943.283 jiwa (Hasil Analisis 2006) dengan mata pencaharian yaitu disektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan dan jasa.

Wilayah Kabupaten Bandung pun sebagian besar di kelilingi oleh pegunungan, dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.4

Wilayah Pegunungan Kabupaten Bandung



Sumber : Subag Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung, 2010

Di antara puncak - puncaknya adalah: Sebelah utara terdapat Gunung Bukittunggul (2.200 m), Gunung Tangkubanperahu (2.076 m) (Wilayah KBB) di perbatasan dengan Kabupaten Purwakarta. Sedangkan di selatan terdapat Gunung Patuha (2.334 m), Gunung Malabar (2.321 m), serta Gunung Papandayan (2.262 m) dan Gunung Guntur (2.249 m), keduanya di perbatasan dengan Kabupaten Garut. Wilayah Kabupaten Bandung beriklim tropis dipengaruhi oleh angina muson dengan curah hujan rata – rata berkisar antara 1500 sampai dengan 4000 mm /tahun, suhu rata – rata berkisar antara 19°C sampai dengan 24°C.

1.2 Sejarah Divisi Humas Pemerintah Kabupaten Bandung

Humas Pemerintah Kabupaten Bandung berdiri setelah masa kepemimpinan K.H Abdurahman Wahid lengser dari jabatannya sebagai Presiden RI. Pasalnya pada masa Jabatan beliau Departemen Penerangan dihapus atau ditiadakan jadi secara otomatis Humas pun tidak ada. Sebelum beliau menjabat sebagai Presiden, Humas Pemerintah Kabupaten Bandung digabungkan dengan Departemen Penerangan, namun setelah beliau lengser dari kepemimpinannya sebagai Presiden, akhirnya Humas di Pemerintah Kabupaten Bandung mulai dirintis kembali dan akhirnya resmi berdiri di Divisi Setda (Sekretaris Daerah) dibawah Assisten Administrasi sampai sekarang.

1.2.1 Tujuan Humas Pemerintah Kabupaten Bandung

Tujuan Humas dalam melaksanakan tugas sebagai penunjang pembangunan adalah :

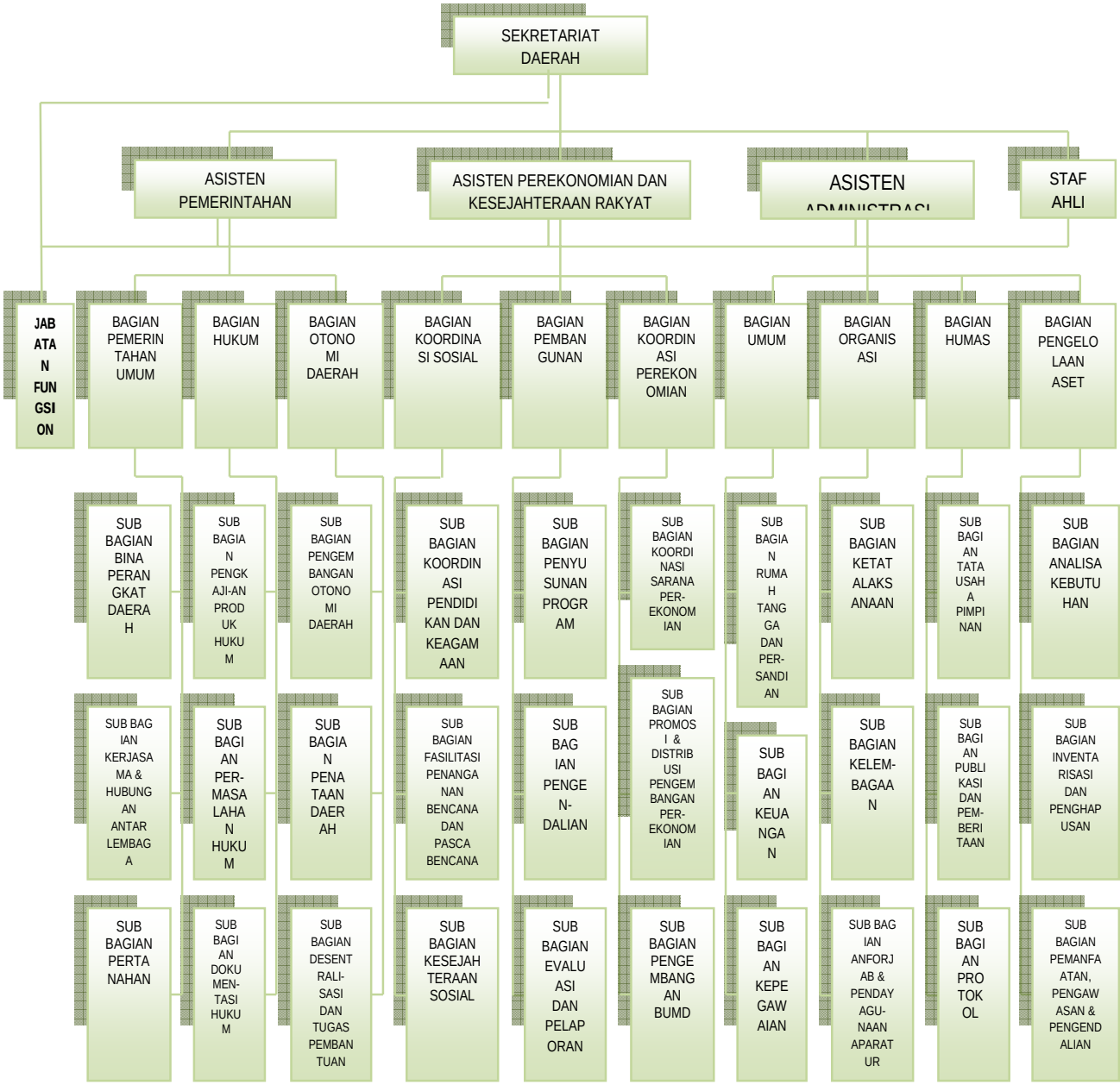
1. Meningkatkan penyampaian berbagai informasi di wilayah Kabupaten Bandung yang akurat dan mutakhir pada masyarakat Kabupaten Bandung.
2. Memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas informasi menuju pemulihan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.
3. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

1.3 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Bagan 1.1

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG



Sumber : Subag Organisasi Kab. Bandung, 2010

Dari gambar atau bagan di atas Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa Bupati dan Wahil Bupati untuk melaksanakannya dibantu oleh Sekretaris Daerah yang membawahi Asisten Pemerintah, Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, serta Asisten Administrasi, dan Staf Ahli.

1.4 Struktur Divisi atau Humas Pemerintah Kabupaten Bandung

Bagan 1.2

STRUKTUR ORGANISASI HUMAS PEMERINTAH

KABUPATEN BANDUNG



Sumber : Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Kab. Bandung, 2010

Dari gambar / bagan diatas Struktur Organisasi Humas Pemerintah Kabupaten Bandung, dapat diketahui bahwa Humas mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kasubag TU Pimpinan, Kasubag Protokol, Kasubag Publikasi dan Pemberitaan yang membawahi bendahara, surat masuk / keluar, koordinasi dan informasi, dokumentasi, kliping. Pada struktur organisaasi diatas terlihat juga Bagian Humas berada di bawah atau masih dinaungi oleh Asisten Administrasi.

1.4.1 Susunan Organisasi Asisten Administrasi Pemerintah Kabupaten Bandung

Susunan Organisasi Asisten Administrasi terdiri dari :

❖ Asisten Administrasi

a. Bagian Umum, membawahkan :
   - o Sub Bagian Rumah Tangga dan Persandian
   - o Sub Bagian Keuangan
   - o Sub Bagian Kepegawaian

b. Bagian Organisasi :
   - o Sub Bagian Ketatalaksanaan
   - o Sub Bagian Kelembagaan
   - o Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur

c. Bagian HUMAS, membawahkan :
   - o Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
   - o Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan
   - o Sub Bagian Protokol

d. Bagian Pengelolaan Aset, membawahkan :

- Sub Bagian Analisa Kebutuhan
- Sub Bagian Inventarisasi dan Penghapusan
- Sub Bagian Pemanfaatan, Pengawasan, dan Pengendalian

1.5 Job Deskription Humas Pemerintah Kabupaten Bandung

Uraian tugas jabatan pada Struktural Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung, antara lain :

1.5.1 Asisten Administrasi

- Asisten Administrasi dipimpin oleh seorang Asisten;
- Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Asisten Administrasi mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan,

keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;

- Asisten Administrasi mempunyai fungsi perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;
- Asisten Administrasi mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pelayanan administrasi umum kerumahtanggaan, keuangan dan kepegawaian, penataan kelembagaan,ketatalaksanaan dan perencanaan pendayagunaan aparatur, pelayanan ketatatausahaan, keprotokolan, publikasi dan pemberitaan serta penataan dan pengelolaan aset pemerintah daerah;

1.5.2 Kasubag Humas

- Bagian Humas dipimpin oleh seorang Kepala Bagian;
- Kepala Bagian Humas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Asisten Administrasi dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;
- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi pengkoordinasian dalam pelaksanaan pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;

- Kepala Bagian Humas mempunyai fungsi penyelenggaraan pembinaan administratif pelayanan ketatausahaan pimpinan, pelayanan keprotokolan pimpinan serta koordinasi pelayanan publikasi dan pemberitaan pembangunan pemerintah daerah;

1.5.3 Kasubag Tata Usaha Pimpinan

- Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan tata usaha pimpinan;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pengelolaan administrasi tata usaha pimpinan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi penyusunan pelaporan kegiatan ketatausahaan pimpinan Sekretariat Daerah;

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai fungsi pelaksanaan layanan ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;

1.5.4 Kasubag Publikasi dan Pemberitaan

- Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan dan pengelolaan publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi penyusunan rumusan kebijakan di bidang publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan analisa umpan balik di bidang publikasi dan pemberitaan;
- Kepala Sub Bagian Publikasi dan Pemberitaan mempunyai fungsi pelaksanaan publikasi kegiatan pemerintah daerah;

1.5.5 Kasubag Protokol

- Sub Bagian Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bagian Humas dalam merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis operasional penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi penyusunan perencanaan teknis operasional pelayanan keprotokolan Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan pemberian pelayanan kepada tamu Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan persiapan dan koordinasi kegiatan keprotokolan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai tugas fungsi pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

1.6 Sarana dan Prasarana Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung

1.6.1 Sarana Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung

Letak kantor Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung terletak di tengah – tengah Komplek Pemda Kabupaten Bandung, disebelah Gedung Moch. Toha. Terletak satu gedung dengan kantor Bupati, Wakil Bupati dan Sekda. Kantor Humas merupakan tempat melayani kebutuhan informasi khususnya mengenai Pemerintahan Kabupaten Bandung dan kegiatannya.

1.6.2 Prasarana Humas Setda Pemerintah Kabupaten Bandung

Prasarana yang dimiliki oleh Humas Setda Kab. Bandung dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi 1 ruangan Kabag Humas Setda Pemkab Bandung, 1 Ruangan Kasubag Humas bagian TU, 1 Ruangan Kerja Humas bagian TU, 1 Ruangan Kasubag Humas Bagian Protokol, 1 Ruangan Kerja Humas bagian Protokol, 1 Ruangan Kasubag Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan, 1 Ruangan Rerja Humas Bagian Publikasi dan Pemberitaan dan 1 Ruangan tempat beribadah (Mushalla) untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 1.1

Prasarana Ruangan Kasubag Humas Publikasi & Pemberitaan

No	Nama Barang	Unit	Keterangan
1	Meja + Kursi Kerja	1	Baik
2	Meja + Kursi Tamu	1	Baik
3	Meja Kayu	1	Baik
4	Kursi Kayu	1	Baik
5	Mesin Tik	1	Baik

6	*White Board*	1	Baik
7	Peta	1	Baik

Sumber : Arsip Penulis, 2010

Dari tabel diatas dapat diketahuhi bahwa prasarana yang berada di ruangan Kasubag humas, masih berada dalam kondisi baik.

Tabel 1.2

Prasarana Ruangan Kerja Humas Publikasi & Pemberitaan

No	Nama Barang	Unit	Keterangan
1	Komputer	5	Baik
2	Printer	3	Baik
3	Modem	1	Baik
4	Kursi Kayu	1	Baik
5	Mesin Tik	2	Baik
6	Meja + Kursi Komputer	5	Baik
7	Meja Kaca	1	Baik
8	Kursi Kayu	6	Baik
9	*Filling Cabinet*	3	Baik
10	Lemari Kaca	4	Baik
11	Meja Kayu	4	Baik

Sumber : Arsip Penulis, 2010

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan di Pemerintahan Kabupaten Bandung di Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Setda Kabupaten Bandung yang bertempat di Komplek Pemda Jalan Raya Soreang – KM 17 Kab. Bandung, Tlp. (022) 5891191, 5891192, 5891143 Fax. (022) 594, Soreang 40911. Alamat Website : http://www.bandungkab.go.id

1.7.2 Waktu PKL

Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang penulis ikuti yaitu selama 22 Hari. Adapun pelaksanaan PKL itu sendiri dimulai sejak tanggal 15 Juli 2010 sampai 25 Agustus 2010 di Subag Humas Publikasi dan Pemberitaan Setda Pemerintahan Kabupaten Bandung yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang dimulai sejak pukul 08.00 – 16.00 WIB sesuai dengan jam kerja pegawai, kecuali di Bulan Ramadhan penulis masuk pukul 08.00 – 14.20 WIB, tetapi apabila ada kegiatan diluar jam kerja, penulis mengalami penambahan jam kerja sesuai dengan kegiatan yang dihadiri oleh penulis.